

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Bahan acuan yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam penelitian ini terkait dengan penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian oleh Ni Luh Gede Ariantini, Anjuman Zukhri, dan Made Ary Meitriana yang berjudul "*Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri*". Jurnal ini membahas tentang penyajian laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri tahun 2013, dimana dalam penyajian laporan keuangannya hanya menyediakan informasi terkait dengan laporan neraca dan laporan SHU (Sisa Hasil Usaha). Penerapan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri berdampak pada penurunan SHU KSP Lembang Sejahtera Mandiri tahun 2013 sebesar Rp 34.960.000,00. Penurunan ini disebabkan karena terdapat biaya-biaya yang tidak tercatat dalam laporan SHU KSP LSM, diantaranya biaya honor pengurus, biaya pelatihan, biaya sosial, serta biaya pembangunan daerah kerja.
2. Penelitian oleh Arma Yuliza dan Sri Yunawati yang berjudul "*Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK-ETAP Pada*

Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pengaraian". Jurnal ini membahas tentang pemahaman pihak BPR Kota Pasir Pengaraian terhadap penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan. Dalam pengungkapan penyajian segala bentuk catatan arus kas yang ada pada BPR Kota Pasir Pengaraian telah mengacu dengan SAK ETAP dengan baik, bahkan penerapan SAK ETAP di BPR Kota Pasir Pengaraian sudah diterapkan sejak tahun 2010. Hal ini, memberikan bukti atau kesimpulan bahwa para karyawan dan staff di BPR Kota Pasir Pengaraian memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan susunan aturan SAK ETAP secara menyeluruh serta menguasai dengan baik, sehingga ketika melakukan pengungkapan dan pencatatan transaksi di laporan keuangan dapat tersusun secara rapi dan sesuai dengan SAK ETAP.

3. Penelitian oleh Jovan R. Tamon, Jullie J. Sondakh, dan Lidia M. Mawikere yang berjudul "*Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado*". Jurnal ini berisi tentang evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan dengan kaitannya aturan SAK-ETAP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013. Kesimpulan daripada isi jurnal ini adalah masih banyak ketidaksesuaian penyajian laporan dengan kedua peraturan tersebut. Bahkan terdapat beberapa

laporan-laporan yang tidak diterbitkan oleh pihak BPR CCI Manado, padahal menurut PBI dan SAK ETAP wajib untuk diterbitkan, misalnya: persediaan, properti investasi, kewajiban diestimasi, dan masalah tenaga kerja.

4. Penelitian oleh Brigitta Dyah Karisma yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman)*”. Jurnal ini membahas tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman. Dari jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, entitas sudah sesuai secara keseluruhan dalam penyajian laporan keuangan dengan menggunakan aturan tetap SAK ETAP. Secara sistem dan bentuk laporan yang dibuatnya telah sama persis dengan macam-macam laporan yang ada dalam ketentuan SAK ETAP. Ketika penyajian laporan terdapat kendala, namun kategori kendalanya tidak signifikan sehingga tidak terlalu mengganggu pihak perusahaan dalam penerapan SAK ETAP serta dalam proses penyajian laporannya.
5. Penelitian oleh Andri Pratama yang berjudul “*Rancangan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus Pada Konveksi As-Shaqi*

Pemulang)”. Jurnal ini berisi tentang bagaimana rancangan penerapan SAK ETAP pada UKM Konveksi As- Shaqi. Dalam menerapkan metode SAK ETAP UKM konveksi as-shaqi masih ada beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam penerapan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan konveksi yang sesuai dengan standar yang baku karena faktor pendidikan yang belum memadai untuk mengelola jalannya keuangan perusahaan. Dengan adanya rancangan penerapan SAK ETAP memberikan kemudahan pihak konveksi dalam mengolah data-data perusahaan yang tersedia guna membuat laporan keuangan baku bagi entitas serta

6. untuk melihat kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	JURNAL/SKRIPSI	PERBEDAAN	
		Terdahulu	Sekarang
1.	Ni Luh Gede Ariantini, Anjuman Zuhri, dan Made Ary Meitriana. 2014. Dengan judul " <i>Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri</i> "	<p>Lokasi : Bandung Metode : Deskriptif kuantitatif Teknik pengumpulan data : Wawancara Substansi : Kajian terkait penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri. Objek : laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri tahun 2013</p>	<p>Lokasi : Bantul Metode : Kualitatif Deskriptif. Sample : Purposive Sampling Teknik pengumpulan data : Interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi : Kajian tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pengungkapan laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Objek : BPRS Margirizki Bahagia.</p>
2	Arma Yuliza dan Sri Yunawati. 2015, dengan judul " <i>Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK-ETAP Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pengaraian</i> ".	<p>Lokasi : Kota Pasir Pengaraian Metode : Deskriptif Kuantitatif Teknik pengumpulan data : Kuesioner. Substansi : Kajian terkait pemahaman dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BPR Kota Pasir Pengaraian. Objek :BPR Kota Pasir Pengaraian.</p>	<p>Lokasi : Bantul Metode : Kualitatif Deskriptif. Sample : Purposive Sampling Teknik pengumpulan data : Interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi : Kajian tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pengungkapan laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Objek : BPRS Margirizki Bahagia</p>

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	JURNAL/SKRIPSI	PERBEDAAN	
		Terdahulu	Sekarang
3	Jovan R. Tamon, Jullie J. Sondakh, dan Lidia M. Mawikere. 2016, dengan judul <i>“Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado”</i> .	Lokasi : Manado Metode : Deskriptif Teknik pengumpulan data : Wawancara. Substansi : Kajian terkait evaluasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan aturan SAK ETAP dan PBI Nomor 15/3/PBI/2013 Objek : Laporan keuangan BPR CCI Manado	Lokasi : Bantul Metode : Kualitatif Deskriptif. Sample : Purposive Sampling Teknik pengumpulan data : Interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi : Kajian tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pengungkapan laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Objek : BPRS Margarizki Bahagia
4	Brigitta Dyah Karisma. 2016, dengan judul <i>“Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman)”</i> .	Lokasi : Sleman Metode : Deskriptif Komparatif. Teknik pengumpulan data : Wawancara, dokumentasi, dan Observasi. Substansi : Kajian terkait evaluasi penerapan SAK ETAP pada pelaporan keuangan PD BPR Bank Sleman. Objek : Laporan keuangan tahunan PD BPR Bank Sleman tahun 2014.	Lokasi : Bantul Metode : Kualitatif Deskriptif. Sample : Purposive Sampling Teknik pengumpulan data : Interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi : Kajian tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pengungkapan laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Objek : BPRS Margarizki Bahagia
5	Andri Pratama. 2014, dengan judul <i>“Rancangan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus Pada Konveksi As-Shaqi Pemulang)”</i>	Lokasi : Pemulang Metode : Kualitatif Deskriptif berupa studi kasus. Teknik pengumpulan data : Wawancara dan Observasi Substansi : Kajian terkait rancangan penerapan SAK ETAP pada UKM. Objek : Konveksi As-Shaqi pemulang.	Lokasi : Bantul Metode : Kualitatif Deskriptif. Sample : Purposive Sampling Teknik pengumpulan data : Interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Substansi : Kajian tentang penerapan SAK ETAP terhadap penyajian pengungkapan laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Objek : BPRS Margarizki Bahagia

B. Kerangka Teoritik

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip muamalah islam. Berdirinya BPRS didasari dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa:

BPRS merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.¹

Tujuan didirikannya BPRS adalah sebagai cara aktif dalam rangka menunjang perekonomian indonesia perihal kebijaksanaan keuangan, moneter dan juga perbankan secara umum. Kehadirannya sampai saat ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan para pengusaha kecil serta mikro. Salah satu bentuk kontribusi daripada BPRS adalah membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan atau UMKM.

¹Husaeni Uus Ahmad, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia". Jurnal EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017. Hlm. 7.

Dalam sistem perbankan syariah, BPRS merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi-transaksi perbankan, yaitu:

- 1) Perniagaan atas barang-barang yang haram.
- 2) Riba
- 3) Maisir
- 4) Gharar.²

b. Tujuan Pendirian BPRS

Adapun tujuan didirikannya BPRS, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi.
- 3) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 4) Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan bermuamalah berprinsip syariah.
- 5) Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat.
- 6) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana.

²Lutfinanda Akhirul dan Andwiani Sinarasri, “*Analisis Pengaruh Pengungkapan Syari’ah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus : di BPRS Kota Semarang)*”.*JurnalMaksimum*, Vol. 4, No. 1, September 2103-Februari 2014. Hlm. 25.

- 7) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan dari masyarakat pedesaan.
- 8) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.

c. Kegiatan Usaha BPRS

Dalam kegiatan usahanya BPRS didasarkan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa: simpanan deposito berjangka, tabungan dan simpanan amanah serta simpanan lainnya yang disetarakan.
- 2) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan bagi hasil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan (PP).
- 3) Meletakkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit, dan tabungan pada bank lain.
- 4) Mengadakan pemberian kredit.

d. Kegiatan Usaha yang Dilarang

Menurut pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pihak BPRS yaitu antara lain:

- 1) Ikut serta dalam penyertaan modal.
- 2) Melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.

- 3) Melaksanakan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992.
- 4) Menjalankan usaha perasuransian.
- 5) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.³

e. Kendala Perkembangan BPRS

Dalam kegiatan operasional BPRS mengalami beberapa kendala, diantaranya:

- 1) Upaya dalam peningkatan profesionalitas masih terhalang dengan rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPRS sehingga proses BPRS dalam menjalankan aktivitasnya cenderung lambat serta respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan SDM yang diarahkan ke semua posisi, baik diposisi pemegang kebijakan maupun posisi di lapangan.
- 2) Kiprah BPRS yang kurang dikenal oleh masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan ada sebagian pihak yang menganggap bahwa antara BPR konvensional dan BPR Syariah itu sama.

³Rodoni Ahmad,dan Abdul Hamid, "*Lembaga Keuangan*". Zikrul Hakim, Jakarta, 2008. Hlm. 44.

- 3) BPRS harus bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada disekitarnya, misalnya dengan membentuk majelis-majelis taklim atau semacamnya.
- 4) Kurang adanya koordinasi di antara BPRS, sebagai lembaga keuangan yang memiliki tujuan syiar islam tentunya dibutuhkan langkah koordinasi guna memperoleh strategi yang terpadu agar dapat mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan *framework* yang dapat dijadikan acuan antara lembaga keuangan yang ada di kabupaten, kecamatan, desa maupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengesampingkan keberadaan lembaga keuangan lainnya.
- 5) Nama BPRS, masih menyisakan kesan sistem BPR konvensional. Kata “perkreditan” tidak ada dalam terminology bank dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, baik kiranya nama BPRS diganti.⁴

⁴Sudarsono Heri, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 3*”. Ekonisia, Yogyakarta, 2008. Hlm 100.

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah memiliki 2 arti kata yakni akuntansi serta syariah. Akuntansi merupakan identifikasi transaksi yang disertai dengan aktivitas pencatatan, penggolongan dan juga pengikhtisarian transaksi agar membuahkan laporan keuangan yang mampu digunakan untuk mengambil alih bentuk keputusan. Sedangkan, Syariah merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan ditaati tiap-tiap manusia di dalam menjalankan segala kegiatan kehidupan di dunia. Sehingga, Akuntansi Syariah bisa disimpulkan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang cocok dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah amat diperlukan untuk menunjang segala bentuk aktivitas yang dilakukan wajib sesuai dengan syariah, sebab tidak mungkin bisa menerapkan akuntansi yang sesuai syariah kalau transaksi yang akan di catat tidak sesuai dengan syariah.⁵

⁵Nurhayati siti, Wasilah. “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, Salemba Empat, Jakarta, 2015. Hlm. 02.

b. Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum Akuntansi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282, meskipun dalam Al-Qur'an tersebut tidak secara langsung menyinggung tentang akuntansi, tapi, terdapat ayat yang membahas tentang pencatatan yang tidak tunai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”* (QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat diatas mengandung makna bahwa Allah SWT memerintah kepada setiap manusia yang bermuamalah untuk selalu melakukan pencatatan terhadap transaksi yang bersifat tidak tunai. Perintah ini senantiasa telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen atau kwitansi sebagai bukti telah adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.⁶ Selain itu juga mengandung nilai-nilai, antara lain:

- 1) Pencatatan dilakukan dengan sebenar-benarnya.
- 2) Pencatatan dilakukan dengan jujur dan apa adanya.
- 3) Pencatat merupakan orang yang ahli dalam bidangnya.

⁶Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *“Akuntansi Perbankan Syariah”*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, Hlm. 02.

- 4) Setiap transaksi harus selalu dicatat (larangan untuk jemu mencatat) baik transaksi besar maupun kecil.
- 5) Menggunakan saksi (bukti transaksi) yang menguatkan, adil dan tidak menyulitkan.
- 6) Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT.
- 7) Segala bentuk transaksi yang tidak tunai harus selalu dilakukan pencatatan.⁷

Sumber hukum dari hadist tentang akuntansi :

فَالأَوَّلُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا ۗ

Artinya : “Pertama: Dari Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sabdanya: “*Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.*” (H.R. Muttafaqun ‘alaih).

⁷Alim, Muhammad Nizarul, “Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi”. Jurnal Investasi, Vol. 7, No. 2, Desember 2011. Hlm 154-161.

c. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Menurut Muhammad prinsip-prinsip akuntansi syariah digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: 1) pengukuran dan penyingkapan, 2) pemegang kuasa dan pelaksana.

Pertama, kategori pengukuran dan penyingkapan diantaranya:

- a) Zakat, bagian-bagian harta yang akan dibuat zakat dilakukan pengukuran secara tepat, kemudian diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya sebagaimana telah ditetapkan didalam Al-Qur'an (8 asnaf) atau dapat juga disalurkan melalui lembaga amil zakat yang resmi.
- b) Bebas Bunga, yaitu suatu entitas harus meniadakan adanya pembebanan bunga dari transaksi yang dilakukan, hal ini akan jauh lebih tepat jika entitas berupa bagi hasil atau lainnya yang sifatnya tidak menggunakan instrumen bunga.
- c) Halal, yaitu menjauhi bentuk bisnis yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariah, misalnya: perjudian, alkohol, prostitusi, narkoba, ataupun produk haram lainnya. Selain itu, menghindari juga transaksi yang bersifat spekulatif.

Kedua, kategori pemegang kuasa dan pelaksana diantaranya:

- a) Ketaqwaan, yaitu membenarkan bahwa Allah merupakan Dzat tertinggi di alam semesta. Allah menyaksikan setiap perbuatan manusia yang akan diperhitungkan pada *yaumul hisab*. Mampu membedakan yang benar (*al-haq*) dan yang salah (*al-bathil*), serta mencari ridha dan barokah dari Allah dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas.
- b) Kebenaran, yaitu visi keberhasilan serta kegagalan yang meluas ke dunia sampai mencapai masalah. Menjaga serta memperbaiki hubungan dengan Allah (*hablun mina Allah*) serta sesama manusia (*hablun min al-nas*).
- c) Pertanggungjawaban, yaitu bentuk pertanggungjawaban tertinggi ialah kepada Allah dan sifatnya amanah. Mengakui kerja merupakan ibadah yang sering dihubungkan dengan norma dan nilai syariah. Menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi serta bersedia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Berlaku adil kepada sesama ciptaan Allah, bukan saja hanya kepada manusia.⁸

⁸ Muhammad, "Pengantar Akuntansi Syari'ah", Salemba Empat, Jakarta, 2002. Hlm. 114-115.

3. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dan ukuran hasil usaha perusahaan. Setiap entitas memiliki laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Jenis laporan keuangan entitas umumnya meliputi : neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan catatan arus kas.⁹

Untuk mengetahui kondisi usaha atau kinerja suatu perusahaan maka dibutuhkan transparansi keuangan khususnya BPRS sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 yang berisi tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam rangka transparansi keadaan keuangan, BPRS wajib membuat dan juga menyajikan laporan keuangan dengan wujud dan cakupan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia, antara lain:

(1) Laporan Tahunan, dan (2) Laporan Keuangan Publikasi

⁹Riswan, dan Yolanda Fatrecia Kesuma, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi SatriaWahana Motor". *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 5, No. 1, Maret 2014. Hlm04.

Triwulanan. Bentuk penyampaian laporan tahunan BPRS pada pihak BI secara umum meliputi :

- 1) Informasi umum, antara lain:
 - a) Kepengurusan.
 - b) Kepemilikan.
 - c) Strategi dan kebijakan manajemen.
 - d) Laporan manajemen.
 - e) Perkembangan usaha BPRS serta kelompok usaha BPRS jika ada.

- 2) Laporan Keuangan Tahunan, antara lain:
 - a) Neraca.
 - b) Laba Rugi.
 - c) Arus Kas.
 - d) Perubahan Ekuitas.
 - e) Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
 - f) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi.
 - g) Sumber dan Penggunaan Dana Qardh.
 - h) Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Bentuk laporan tahunan yang dipaparkan merupakan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh direksi atau pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Pembuatan laporan tahunan untuk 1 tahun buku serta disajikan paling sedikit dengan perbandingan 1 tahun buku sebelumnya.

Laporan Keuangan Publikasi BPRS diumumkan secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk serta tatacara yang

telah diatur oleh Bank Indonesia. Untuk posisi ketentuan bulan-bulan diatas paling sedikit terdiri dari :

- 1) Laporan Keuangan, antara lain:
 - a) Neraca.
 - b) Laba Rugi.
 - c) Komitmen dan Kontinjensi.
 - d) Sumber dan Penggunaan Dana ZIS serta Sumber dan Penggunaan Dana Qardh.
 - e) Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada.
(Namun untuk bulan Maret dan September cukup sampai pada point ke 3).

- 2) Kualitas Aktiva Produktif serta Informasi lainnya antara lain:
 - a) Kolektibilitas Aktiva Produktif.
 - b) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
 - c) Aktiva Produktif bagi pihak terkait.
 - d) Komposisi pemegang saham, susunan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah.
 - e) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk.

- 3) Tabel Distribusi Bagi Hasil.

Laporan Keuangan Publikasi mesti disajikan dalam wujud perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya serta ditandatangani oleh direksi BPRS dengan menyertakan namanya secara terang. BPRS dipastikan terlambat melaporkan atau mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia, apabila BPRS melaporkan atau mempublikasikannya melampaui batas akhir waktu yang

ditentukan sebelumnya tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman.¹⁰

b. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan utama laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi secara keseluruhan bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai.
- 2) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi milik perusahaan, asal sumber daya dan pengaruh transaksi atau kejadian yang merubah sumberdaya serta hak atas sumber daya tersebut.
- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor ataupun calon investor serta kreditur dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit yang rasional.
- 4) Memberikan informasi mengenai bisnis ataupun kegiatan ekonomi suatu entitas bagi yang menginginkan untuk mempelajari informasi tersebut.
- 5) Membantu pemakai laporan dalam mengakses jumlah, waktu dan ketidak-pastian penerimaan kas dari deviden atau bunga serta penerimaan dari penjualan atau penarikan kembali surat berharga atau pinjaman.
- 6) Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas dalam satu periode.¹¹

¹⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/47/PBI/2005 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hlm. 4-9.

c. Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan

Supaya informasi laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat bagi pemakai keputusan investasi, kredit dan jenis keputusan lainnya, maka diperlukan karakteristik daripada informasi laporan keuangan tersebut, antara lain:

- 1) Dapat dipahami berarti informasi akuntansi harus cukup transparan sehingga masuk akal bagi pemakai informasi.
- 2) Relevansi berarti informasi harus mampu menyajikan perbedaan bagi pembuat keputusan yang memiliki nilai prediket atau umpan balik.
- 3) Reliabilitas bahwa informasi yang disajikan harus dapat diandalkan, lengkap, bebas dari kesalahan atau bias yang material, terpercaya, serta dapat diharapkan untuk mempresentasikan secara wajar substansi ekonomi dari peristiwa atau transaksi yang mendasari.
- 4) Komparabilitas, yaitu informasi tersebut harus dapat dibandingkan antar periode dari perusahaan.¹²

¹¹Munawir S, "*Analisis Informasi Keuangan*", Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. Hlm. 20.

¹²Horrison T Walter, Charles T Horngen, C William Thomas dan Themin Suwardy, "*Akuntansi Keuangan*", Erlangga, Jakarta, 2011. Hlm 9-10.

d. Penyajian Pengungkapan Laporan Keuangan

Penyajian (*presentation*) menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Laporan Keuangan wajib menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan diikuti pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk penyajian pada laporan keuangan berbasis SAK ETAP biasanya berupa : neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, perubahan arus kas, rekonsiliasi dan pendapatan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana zakat, serta catatan atas laporan keuangan.¹³

Pengungkapan adalah bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan adalah langkah akhir dalam proses akuntansi yakni penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh pos statemen keuangan dari aktivitas akuntansi. Tujuan pengungkapan yaitu menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Pihak yang menjadi tujuan untuk diberi informasi terkait pengungkapan laporan keuangan, seperti : para investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2015 tentang SAK ETAP BPRS.

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, hal ini disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Suwardjono (2014) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

a. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Memadai)

Adequate Disclosure adalah konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b. *Fair or Ethical Disclosure* (Pengungkapan Wajar atau Etis)

Fair or Ethical Disclosure adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasi yang sama. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi, sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.

c. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Full Disclosure adalah tingkat yang menuntut penyajian secara penuh untuk mengungkapkan

informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah.

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu : pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*discretionary disclosure*).

- a. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori pensignalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi *privat* yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.
- b. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.¹⁴

¹⁴ Suwardjono, "Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan". BPFE, Yogyakarta, 2014. Hlm. 578.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

a. Definisi SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan sebuah ketetapan standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang dimaksud adalah sebuah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.¹⁵

Aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satunya adalah standar yang digunakan. Hal tersebut didukung oleh tujuan dari standar akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, relevan, terpercaya dan dapat diperbandingkan.¹⁶ SAK ETAP pada BPRS berlaku secara efektif mulai per 26 Maret 2015 setelah adanya penetapan tanggal dari SOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015.¹⁷

¹⁵ www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap# diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 22.29 wib.

¹⁶ Agustami Silviana, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung)", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 3, 2017. Hlm 248.

¹⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/SEOJK.03/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hlm. 2.

Hadirnya SAK ETAP sangat memberikan manfaat bagi BPRS khususnya serta perusahaan-perusahaan kecil umumnya (seperti UKM, Koperasi, salon dan perusahaan lainnya) dimana pihak perusahaan tidak perlu lagi membuat laporan keuangan menggunakan SAK Umum lagi, karena ketentuan SAK Umum jauh lebih kompleks daripada SAK ETAP. Aspek SAK ETAP yang lebih ringan dan banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan terkait dengan standar akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Dengan diterapkannya SAK ETAP pada BPRS, diharapkan kualitas laporan keuangan yang disusunnya akan meningkat dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik serta sesuai dengan peraturan akuntansi yang ada.

b. Ruang Lingkup SAK ETAP

Sebagaimana dalam ruang lingkup SAK ETAP bahwa standar ini dimaksudkan untuk digunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Kategori entitas tanpa akuntabilitas publik, sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Selain entitas tanpa akuntabilitas publik, standar ini juga menjelaskan tentang entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Entitas jenis ini dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Kategori entitas adalah sebagai berikut:

- 1) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai lembaga fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, misalnya: bank, asuransi, pedagang efek, dana pensiun, reksa dana serta bank investasi.
- 2) Entitas telah mengajukan atau masih pada proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengklasifikasikan jenis laporan lengkap untuk BPRS yang sesuai dengan standar akuntansi SAK ETAP yang berpedoman pada peraturan PAPSI BPRS tahun 2015, antara lain:

1) Neraca

Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas modal yang ditunjukkan pada akhir periode

tertentu. Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a) Piutang usaha dan piutang lainnya.
- b) Kas dan setara kas.
- c) Properti investasi.
- d) Persediaan.
- e) Aset tidak berwujud.
- f) Aset tetap.
- g) Aset serta kewajiban pajak.
- h) Kewajiban diestimasi.
- i) Utang usaha dan utang lainnya.
- j) Ekuitas.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan semua pos pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode tertentu yang menyatakan komponen laba rugi. Laporan Laba Rugi minimal mencakup pos-pos, sebagai berikut:

- a) Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*:
 - i. pendapatan dari jual beli.
 - ii. pendapatan dari bagi hasil.
 - iii. pendapatan usaha utama lain.
 - iv. pendapatan dari sewa.
- b) Pendapatan usaha lain.
- c) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer.
- d) Beban usaha.
- e) Laba usaha.
- f) Pendapatan non usaha.
- g) Beban non usaha.
- h) Beban pajak penghasilan.

i) Laba neto.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi sebagai berikut:

- a) Modal saham, misalnya penambahan modal saham.
- b) Dana Setoran Modal.
- c) Saldo laba (laba ditahan).
- d) Surplus revaluasi aset tetap.

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas Bank sepanjang periode tertentu yang di kelompokkan didalam kegiatan operasi, investasi serta pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi sebagai tambahan sumber informasi yang tidak disediakan pada laporan keuangan sesuai dengan kewajiban SAK ETAP. Catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan pembiayaan, simpanan, pendapatan, serta beban wajib memperlihatkan secara terpisah kuantitas dari setiap tipe transaksi serta saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham, serta pihak-pihak yang memiliki jalinan istimewa.

6) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Laporan ini berisi rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

7) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan ini menjelaskan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sepanjang jangka waktu tertentu, dan juga saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Komponen laporan keuangannya, antara lain:

- a) Dana zakat yang berasal dari:
 - i. internal Bank.
 - ii. Eksternal Bank.
- b) Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kenaikan atau penurunan dana zakat.
- d) Saldo awal dana zakat.
- e) Saldo akhir dana zakat.

8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

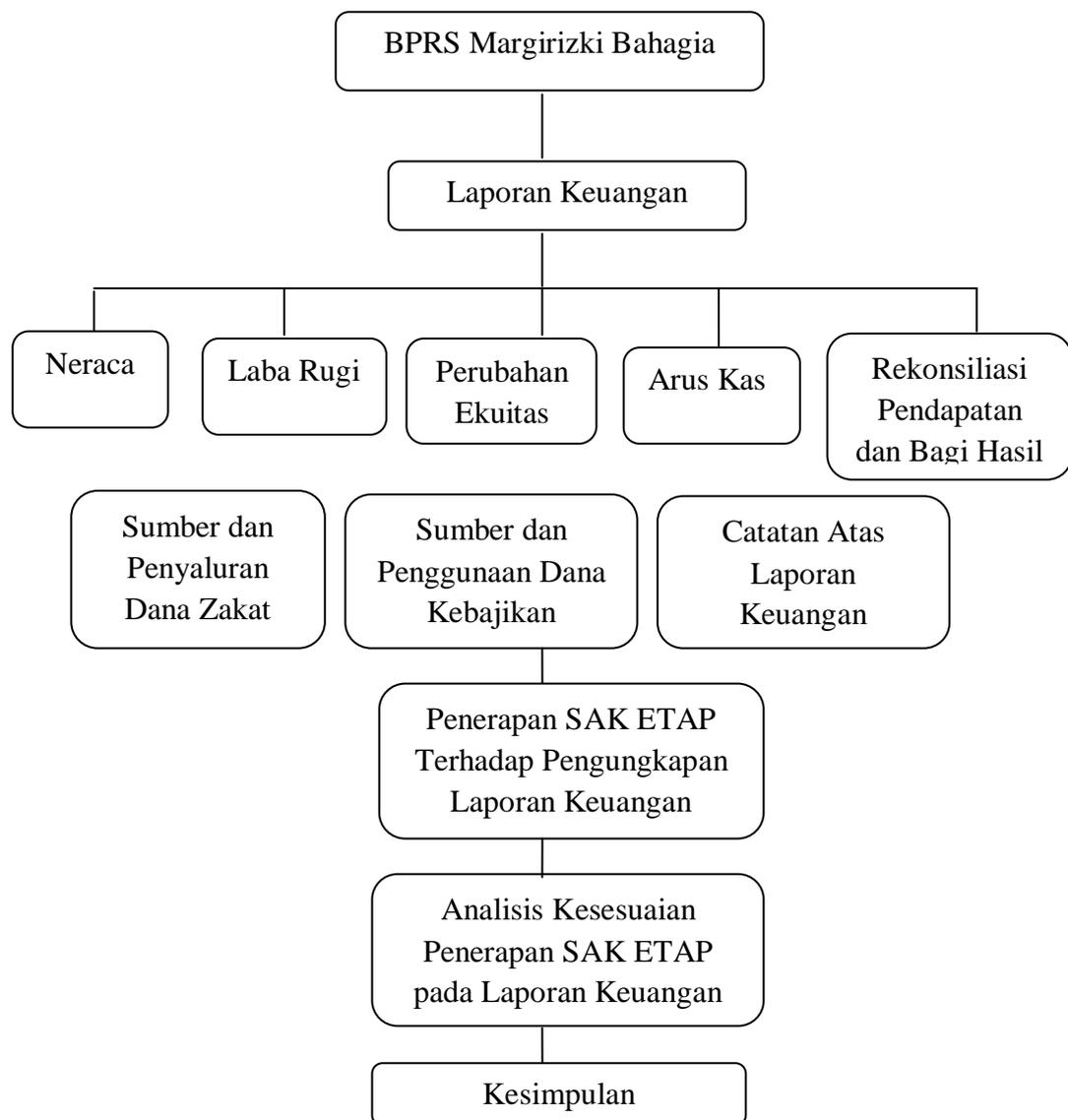
Laporan ini menjelaskan sumber serta penggunaan dana kebajikan sepanjang jangka waktu tertentu, dan juga saldo dana kebajikan yang memperlihatkan dana kebajikan belum disalurkan pada tanggal tertentu. Komponen laporan keuangannya antara lain:

- a) Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, diantaranya:
 - i. Sedekah.
 - ii. Infak.
 - iii. Pengembalian dana kebajikan produktif.
 - iv. Denda.
 - v. Penerimaan nonhalal.
- b) Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - i. Dana kebajikan produktif.
 - ii. Sumbangan.
 - iii. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
- d) Saldo awal dana kebajikan.
- e) Saldo akhir dana kebajikan¹⁸

¹⁸Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2015 tentang SAK ETAP BPRS.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan deskripsi sementara mengenai gejala yang saat ini menjadi objek permasalahan. Adapun masalah-masalah yang mungkin dianggap penting dalam penelitian ini adalah kesesuaian penyajian pengungkapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan BPRS Margirizki Bahagia. Berikut gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran